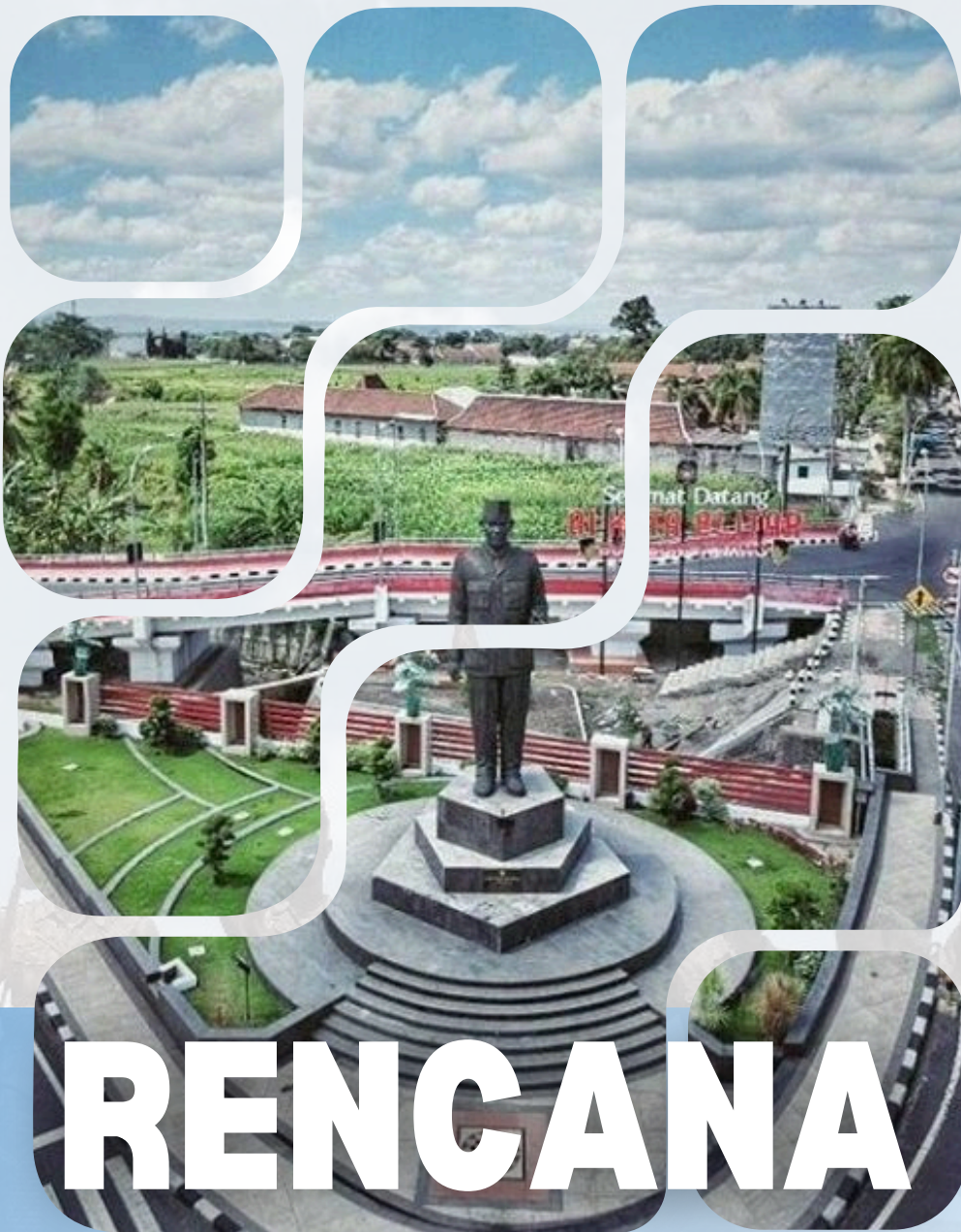




PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KOTA BLITAR

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	17
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	21
2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	21
2.2.2. Permasalahan Pelayanan Daerah	22
2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
2.2.4. Isu Lingkungan Dinasmis.....	23
2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	36

BAB IV	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan ..	44
4.2	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	97
BAB V	PENUTUP	106
5.1	Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra	106
5.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	106
5.3	Rencana Tindak Lanjut	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1
Gambar 1.2. Dokumen Perencanaan OPD	2
Gambar 1.3. Tahapan/Proses Renstra	3
Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9
Gambar 2.2. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	17
Gambar 2.3. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Event Regional	18
Gamabr 2.4. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri.....	19
Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Golongan Ruang.....	13
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Kondisi.....	14
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 – 2026	16
Tabel 2.6.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	31
Tabel 3.2.	Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel 3.3.	Penetapan Renstra Perangkat Daerah.....	37
Tabel 3.4.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	38
Tabel 3.5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	46
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	59
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	96
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	101
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	104

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “**RENCANA STRATEGIS**” (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar (DISPORA) Tahun 2025 – 2029 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (Lima) Tahun, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan OPD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (Lima) Tahun kedepan. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dengan Walikota Blitar dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kota Blitar.

Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD, dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Blitar, 25 September 2025
Kepala Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga Kota Blitar



Moh. Amin Archolis, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, pada tataran teknis RPJMD diterjemahkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk menjabarkan visi, misi, serta tujuan Kepala Daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih operasional. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029 memiliki peran yang sangat penting. Renstra ini menjadi acuan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Blitar selama lima tahun ke depan. Di dalamnya tercakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis bagi jajaran Dinas, tetapi juga menjadi alat ukur kinerja pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga.

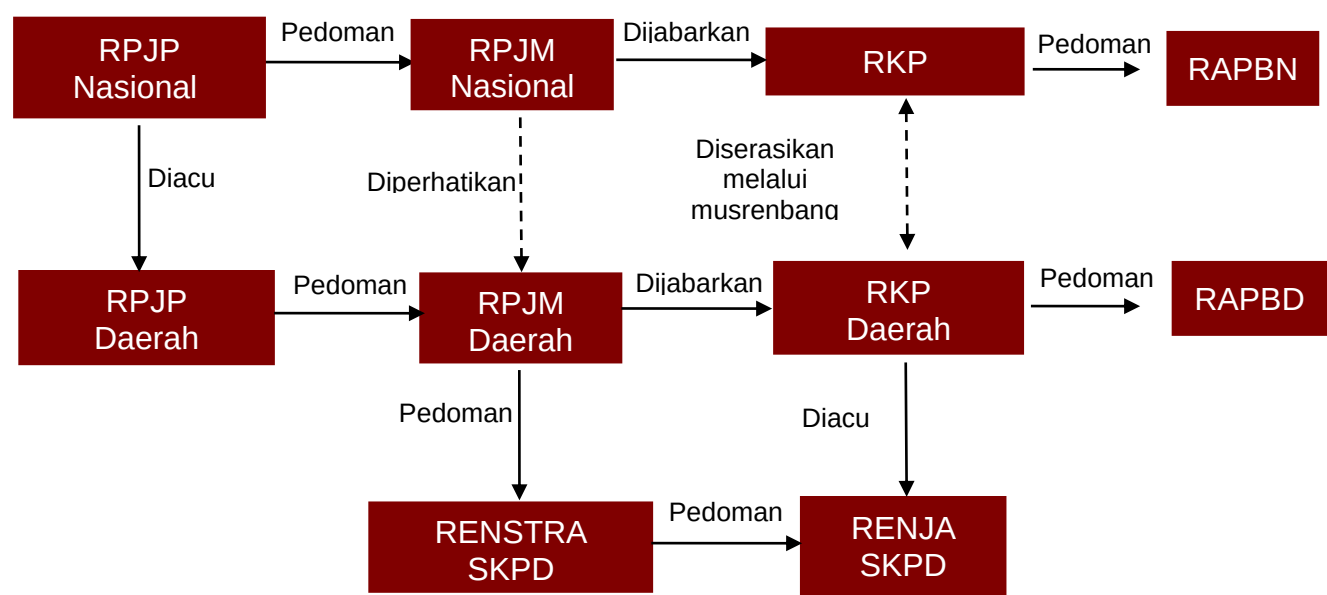
Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan analisis kondisi internal maupun eksternal, identifikasi isu-isu strategis, hingga penelaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Selain itu, penyusunan Renstra juga diselenggarakan melalui forum perangkat daerah serta mekanisme perencanaan pembangunan lainnya agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pertama, Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, sehingga seluruh arah kebijakan dan program yang disusun mendukung pencapaian pembangunan daerah. Kedua, penyusunan Renstra juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, terutama dalam hal pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pemuda dan pengembangan olahraga. Ketiga, Renstra ini mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga agar kebijakan dan program di Kota Blitar sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional.

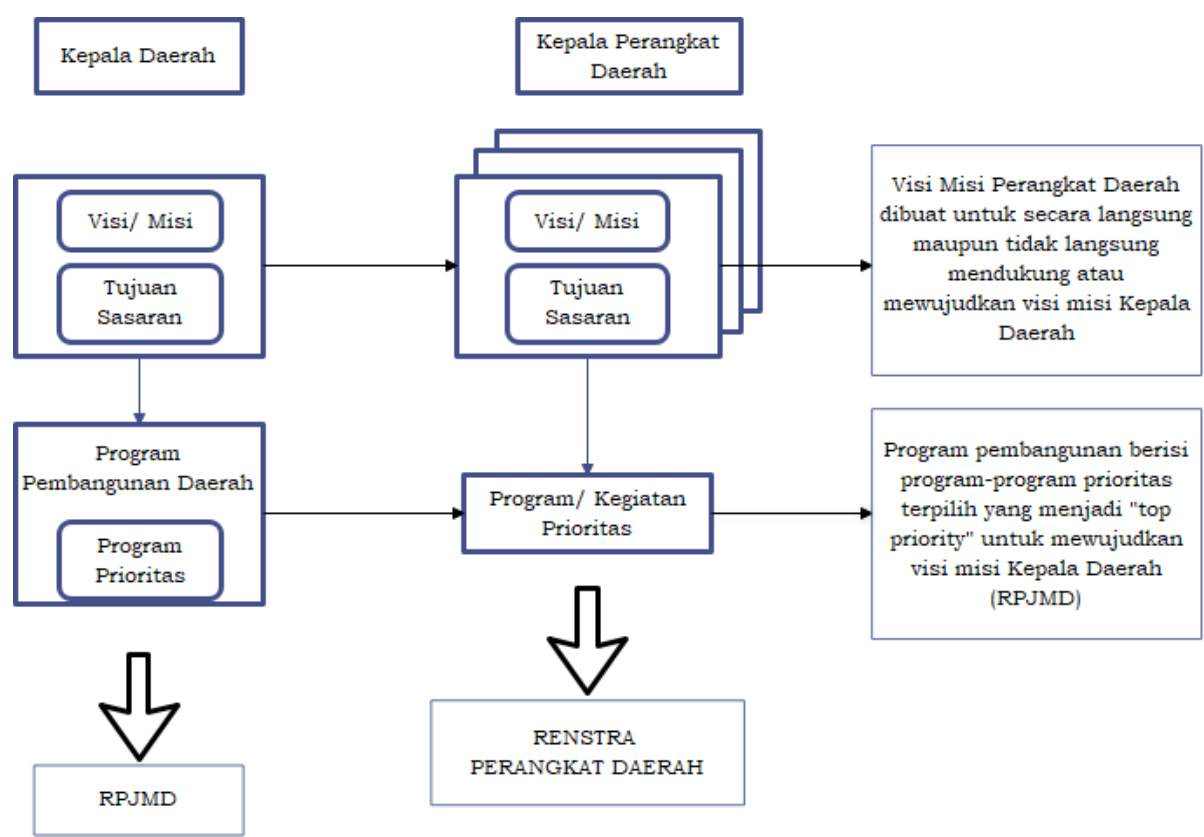
Selanjutnya, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Renja Tahun 2026 sebagai tahun pertama implementasi Renstra akan menjadi pijakan awal pelaksanaan seluruh program dan kegiatan prioritas yang telah dirumuskan, sehingga kesinambungan antara perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan dapat terjaga dengan baik.

Hubungan antar dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan tahapan Renstra disajikan dalam gambar 1.1., 1.2. dan 1.3. sebagai berikut :

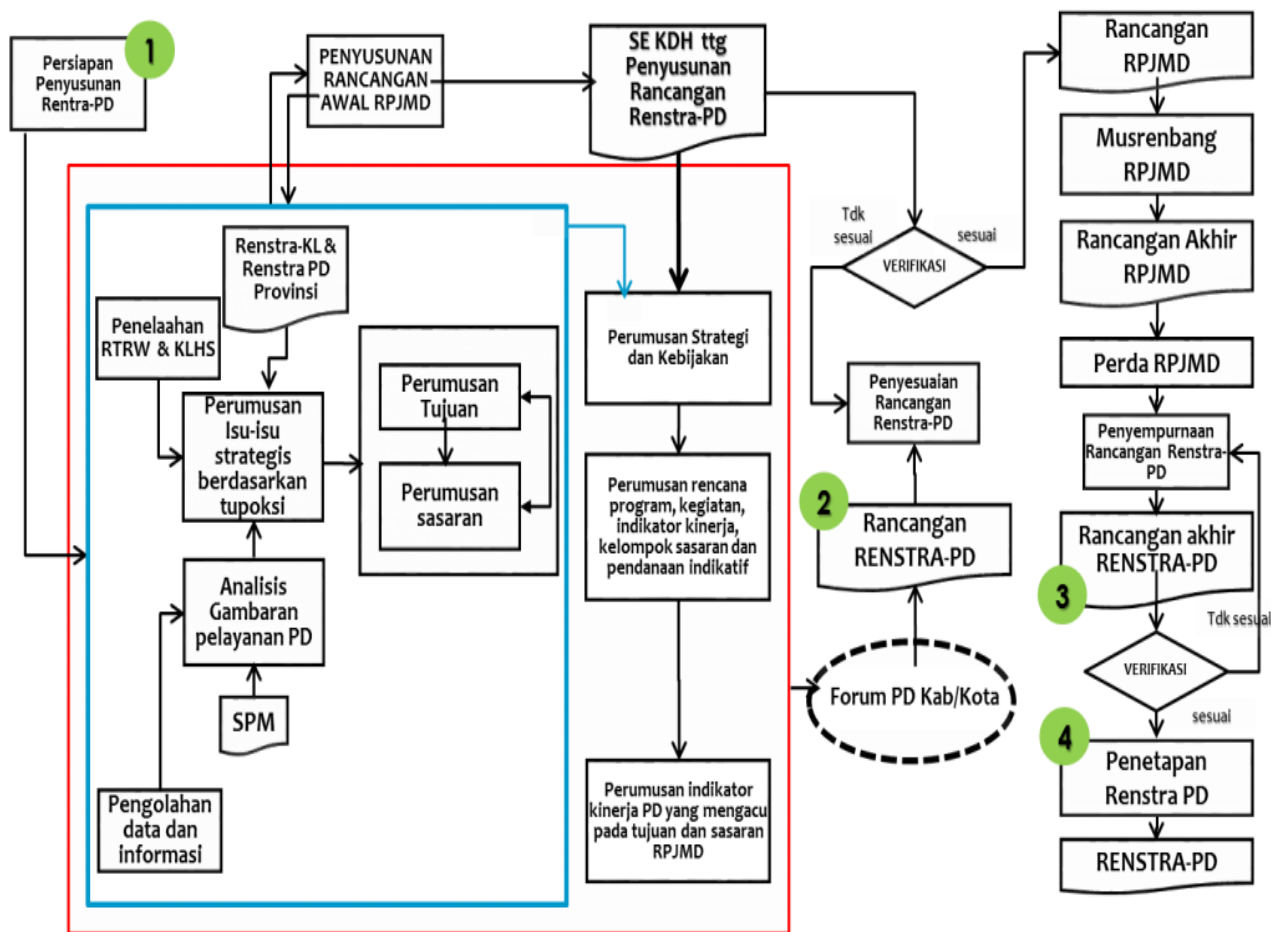
Gambar.1.1.
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar.1.2.
Dokumen Perencanaan OPD



Gambar 1.3.
Tahapan/ Proses Renstra



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun

- 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
 30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2025 Nomor 5 tambahan Lembaran Daerah Nomor 5)
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 54).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan yang secara rinci berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Dokumen RENSTRA.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayan Perangkat Daerah

2.1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah selama tahun 2022-2025.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah dan bentuk layanan yang diberikan Perangkat Daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Memuat mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan baik dalam internal Pemerintah Kota Blitar maupun pihak eksternal terkait pelayanan dan bentuk kemitraannya.

2.1.6. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Memuat kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kerjasama yang dimasukkan dalam bab ini mencakup kerjasama yang melibatkan daerah lain dan dibuktikan dengan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak-pihak terkait.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Memuat potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat telaah isu strategis KLHS dikaitkan dengan alternatif skenario dan rekomendasi.

2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung.

2.2.5. Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat review atas Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional dan Regional). Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja yang didasarkan pada :

- a) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
- b) Sasaran RPJMD Tahun 2025-2026

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi memuat rencana komprehensif perangkat daerah dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya. Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berisikan kedudukan dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah sebagai berikut :

I. Tugas Pokok :

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

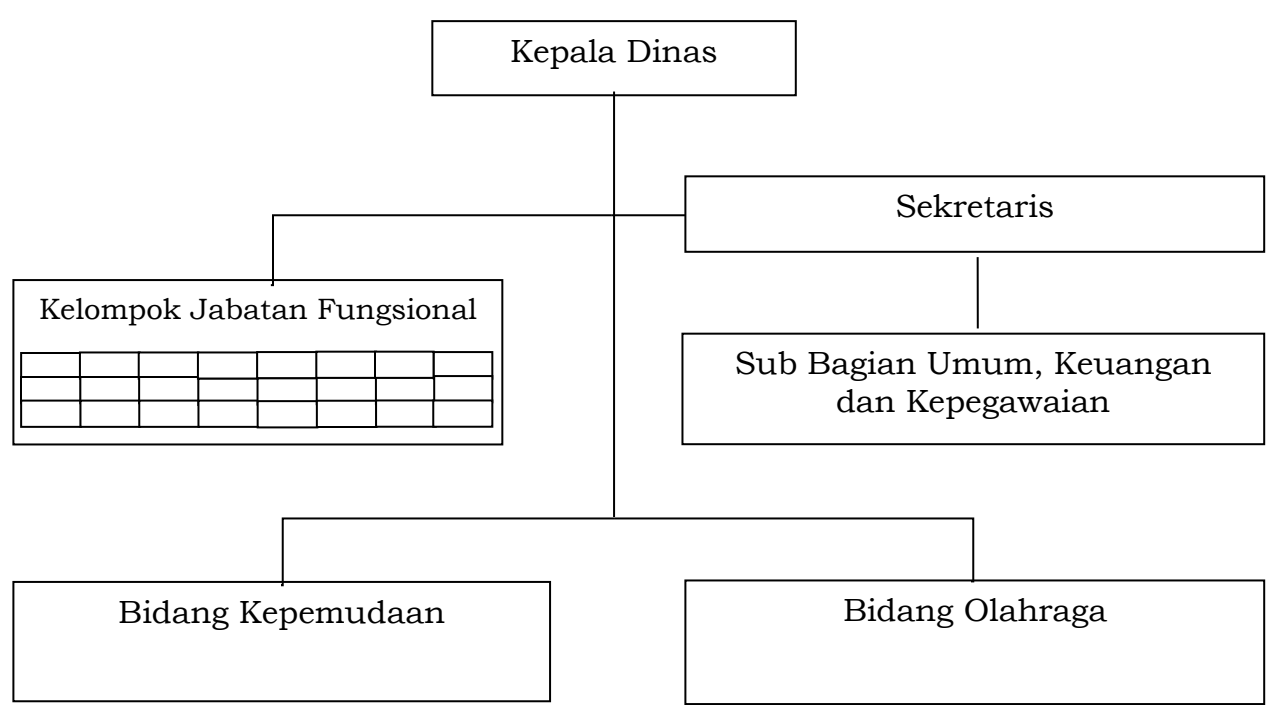
II. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan peraturan perundang undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
14. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;

15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
17. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Blitar memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan berikut ini :

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BLITAR



Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Kepemudaan
4. Bidang Olahraga

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.

2. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang - bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menjalankan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan kepemudaan dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan kepemudaan dan olahraga;

22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 23. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 24. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 26. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi;
 27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. **BIDANG KEPEMUDAAN**
- Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kepemudaan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kepemudaan menjalankan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 2. Penyusunan program/kegiatan di bidang Kepemudaan;
 3. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kota;
 4. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kota;
 5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kecakapan hidup pemuda, kelembagaan dan peran serta pemuda;
 6. Fasilitasi pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas Bidang Kepemudaan;
 7. Pelaksanaan kemitraan dan kewirausahaan bagi pemuda;
 8. Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) bagi pemuda;
 9. Fasilitasi peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 10. Fasilitasi pengaturan sistem penganugerahan prestasi Pemuda;
 11. Fasilitasi peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Bidang Kepemudaan;
 12. Fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem informasi bidang kepemudaan;
 13. Penyusunan norma, standar dan kriteria lembaga kepemudaan;
 14. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 15. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif bagi pemuda;
 16. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan;
 17. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang kepemudaan;
 18. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang kepemudaan;
 19. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;

20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

4. BIDANG OLAHRAGA

Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Olahraga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Olahraga. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Olahraga menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas;
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kota;
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota;
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi;
5. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
6. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
7. Pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, sekolah khusus olahraga, olahraga tradisional, kemitraan dan penghargaan olahraga;
8. Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
9. Penyusunan program/kegiatan di bidang olahraga;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan manajemen dan masyarakat Olahraga, pembinaan prestasi dan sarana prasarana;
11. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di Bidang Olahraga dan kerjasama di Bidang Olahraga;
12. Fasilitasi penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
13. Fasilitasi peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
14. Fasilitasi pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
15. Fasilitasi pemberdayaan dan masyarakat olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
16. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
17. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
18. Fasilitasi peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Bidang Olahraga seperti Gedung dan Kios Stadion Supriadi, Lapangan Tenis Kebon Rojo, GOR Soekarno Hatta serta sarana dan prasarana Olahraga lainnya;
19. Fasilitasi pemungutan retribusi pemakaian sarana dan prasarana Olahraga;
20. Fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem informasi bidang Olahraga;
21. Penyusunan norma, standar dan kriteria lembaga Olahraga;
22. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga-lembaga Olahraga;

- 23. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang Olahraga;
- 24. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Olahraga;
- 25. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 18 orang. Terdiri dari 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	0	1	1
2	Sarjana (S-1)	8	3	11
3	Diploma (D-3)	0	1	1
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4	1	5
Jumlah		12	6	18

Sumber : Dispora 2025

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan /Ruang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	1	1
3	Pembina (IV/a)	-	1	1
4	Penata Tingkat I (III/d)	3	-	3
5	Penata (III/c)	-	-	0
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	-	1
7	Penata Muda (III/a)	5	2	7
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	1	3

9	Pengatur (II/c)	-	-	-
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
12	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
13	Juru (I/c)	-	-	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
15	Juru Muda (I/a)	-	-	-
16	PPPK	-	1	1
J U M L A H		12	6	18

Sumber : Dispora 2025

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke dua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel. 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	2	2	4
2	Jabatan Fungsonal Khusus	2	-	2
3	Jabatan Fungsional Umum	8	3	11
4	PPPK	0	1	1
J U M L A H		12	6	18

Sumber : Dispora 2025

Untuk mendukung kelancaran melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga diperlukan sarana prasarana penunjang. Sarana Prasarana Kantor yang digunakan adalah Gedung Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang terletak di Jl. Sumatra No. 60A Kota Blitar. Ruangn tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang kerja sekretariat, 2 ruang kerja bidang, 1 ruang rapat, 1 ruang pertemuan dan 1 ruang studio. Permasalahan yang ditemui adalah keterbatasan mebelair sarana kerja pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dikarenakan keterbatasan anggaran dan prioritas pendanaan program kegiatan. Untuk melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	14	-
2	Peralatan dan Mesin	478	-

3	Gedung dan Bangunan	62	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	10	-
5	Aset tetap Lainnya	38	-
6	Aset Tidak Berwujud	7	-

Sumber : Dispora 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Kondisi sarpras olahraga dalam kondisi baik. Meskipun dalam kondisi baik tetap perlu dilakukan pemeliharaan dan pengecekan kondisi secara berkala. Sarana prasarana utama yang langsung mendukung kinerja yaitu Gedung yang terdiri dari Gedung Kantor Dispora, Gedung KNPI, Gedung KONI, dan Gedung Kwardcab Pramuka. Kendaraan terdiri dari Kendaraan Pejabat 1 unit, Kendaraan Operasional 6 unit. Dispora juga mengelola 9 unit sarana olahraga yang terdiri dari :

- 1) GOR Sukarno Hatta
- 2) GOR Minarni
- 3) Lapangan Tennis Kebon Rojo
- 4) Stadion Supriyadi
- 5) Sport Center
- 6) Gedung Kebugaran
- 7) Gedung Bela Diri Mastrip
- 8) Sirkuit BMX
- 9) Sirkuit Motor Bung Karno

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ditunjukkan melalui perbandingan antara capaian pelayanan Dispora Kota Blitar dengan target kinerja yang terdapat pada RENSTRA Dispora Kota Blitar periode sebelumnya. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Kota Blitar Tahun 2021 – 2026**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	IKU	0,89%	0,74%	0,88%	0,89%	0,97%	0,97%	0,88%	0,89%	108,98%	131,08%	100%	100%
2	Persentase peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional	IKU	12,79%	10,68%	2,91%	4,05%	12,28%	12,5%	3,16%	4,05%	96,01%	117,04%	108,59%	100%
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	-	50,53%	50,90%	51,35%	52,45%	50,56%	50,84%	51,50%	52,45%	100,05%	99,88%	100,29%	100%
4	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	-	52,50	60,65	-	-	59,67	60,65	-	-	113,65%	100%
5	Persentase Prestasi Olahraga	-	65%	72%	74%	78,02%	64%	72%	74%	78,02%	98,46%	102,77%	100%	100%
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	A (84,19)	A (84,20)	A (84,85)	A (86,5)	A (84,64)	A (84,84)	A (85,9)	A (86.5)	100,53%	100,76%	101,23%	100%
7	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	IKK	80.26%	81.26%	82.86%	84.16%	-	30,11%	9.34%	9.34%	-	37,05%	11,27%	11,09%
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	IKK	80	80	83	83	-	81,78%	83,23%	83,23%	-	102,22%	104,03%	100,27%

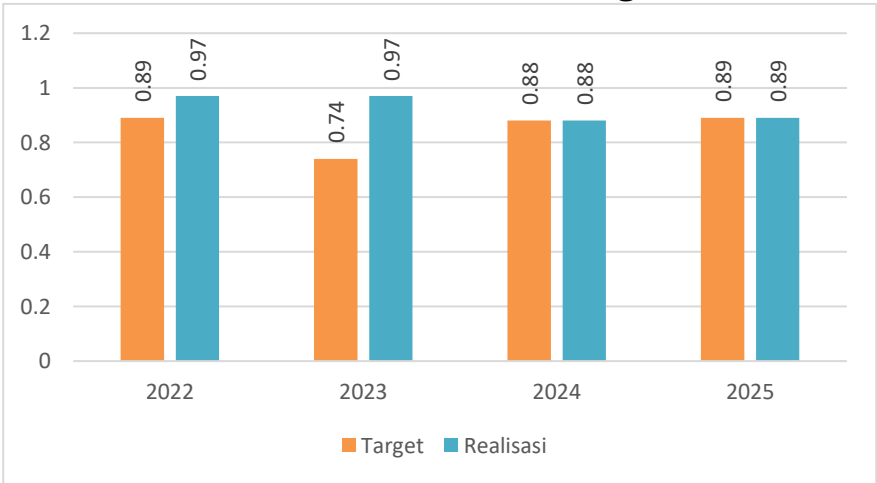
Sumber : Dispora 2025

Berdasarkan Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja indikator menunjukkan hasil yang positif karena mayoritas target tahunan berhasil tercapai bahkan melampaui target, seperti pada indikator peran serta pemuda dalam pembangunan daerah (2022–2023), prestasi olahraga (2023), Indeks Pembangunan Pemuda (2024), serta nilai SAKIP perangkat daerah yang konsisten berada di atas target.

Selain itu masih terdapat indikator yang realisasinya masih rendah atau jauh di bawah target, khususnya pada tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, yang sejak 2023–2025 belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja Dispora Kota cukup baik dan konsisten, tetapi masih memerlukan perhatian khusus pada aspek pemberdayaan ekonomi pemuda agar capaian lebih merata di semua indikator. Berikut akan disajikan gambar grafik dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci :

1) Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Gambar 2.2. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah



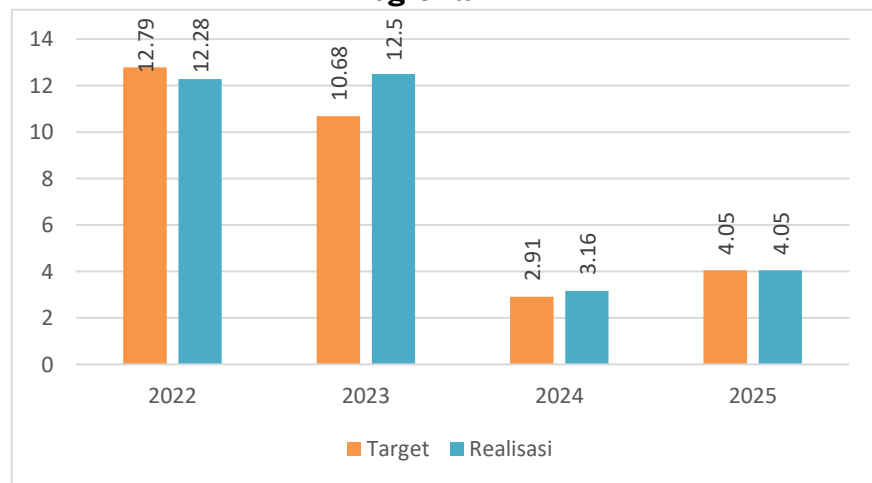
Berdasarkan capaian indikator kinerja persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah tahun 2022–2025, terlihat bahwa realisasi pada tahun 2022 dan 2023 berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing 108,98% dan 131,08%, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 realisasi tercapai sesuai target (100%), sehingga secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif dan konsisten. Faktor pendukung dan penghambat capaian realisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Faktor Pendukung :
 - Adanya kebijakan yang secara konsisten memberikan ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik melalui forum musrenbang pemuda, program kewirausahaan, maupun pelatihan kepemimpinan, menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator di atas target pada tahun 2022 dan 2023.
 - Tersedianya sarana prasarana, seperti pusat kegiatan pemuda dan akses teknologi informasi, mempermudah pemuda untuk berpartisipasi aktif.
 - Organisasi kepemudaan dan komunitas menjadi wadah yang efektif untuk menyalurkan aspirasi, meningkatkan kapasitas, dan memperluas keterlibatan pemuda dalam berbagai aspek pembangunan daerah.

- Keterlibatan berbagai stakeholder seperti lembaga pendidikan, sektor swasta yang mendukung pemuda melalui pendanaan, pendampingan, serta peluang kolaborasi di bidang sosial maupun ekonomi.
 - Meningkatnya kesadaran pemuda akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah mendorong partisipasi aktif, yang terlihat dari capaian realisasi yang melampaui target di dua tahun pertama.
- Faktor Penghambat :
- Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum merata.
 - Tidak semua kegiatan pemuda mendapat dukungan pendanaan dan sarana prasarana yang memadai.
 - Kegiatan kepemudaan masih cenderung bersifat rutinitas dan tidak mengalami pengembangan yang signifikan.

2) Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional

Gambar 2.3. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional

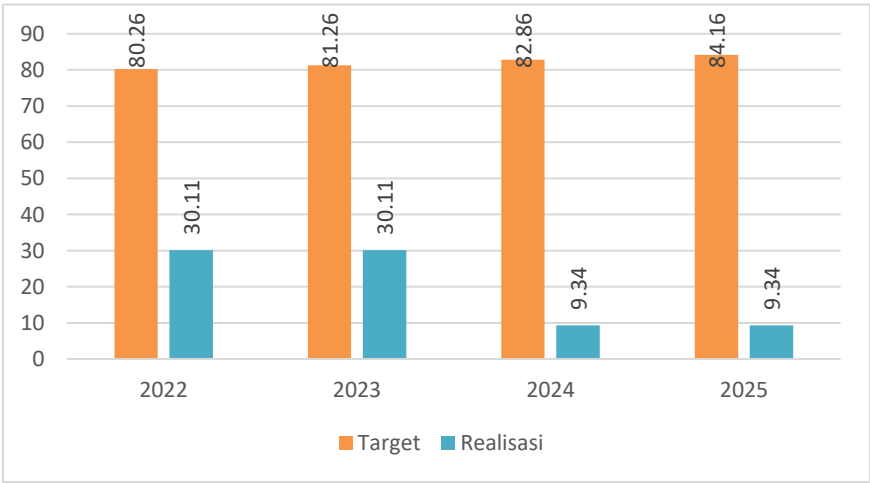


Berdasarkan capaian indikator kinerja persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional tahun 2022–2025, terlihat bahwa realisasi tahun 2022 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target nya. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 realisasi telah memenuhi diatas target yang di tetapkan. Dan di tahun 2025 optimis terealisasi sesuai dengan target. Terjadi penurunan target yang cukup signifikan di tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah event regional yang di selenggarakan. Faktor pendukung dan penghambat capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendukung :
- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan latihan
 - Dukungan pemerintah daerah yang memberikan alokasi anggaran untuk pembinaan sekaligus penghargaan
 - Adanya kompetisi tingkat kota sebelum event regional sehingga atlet lebih siap
- Faktor Penghambat :
- Belum semua sarpras dan kebutuhan peralatan latihan cabang olahraga terpenuhi
 - Minimnya pembinaan atlet usia dini di beberapa cabor
 - Tidak semua pelatih pada cabang olahraga mempunyai sertifikat pelatih

3) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Gambar 2.4. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

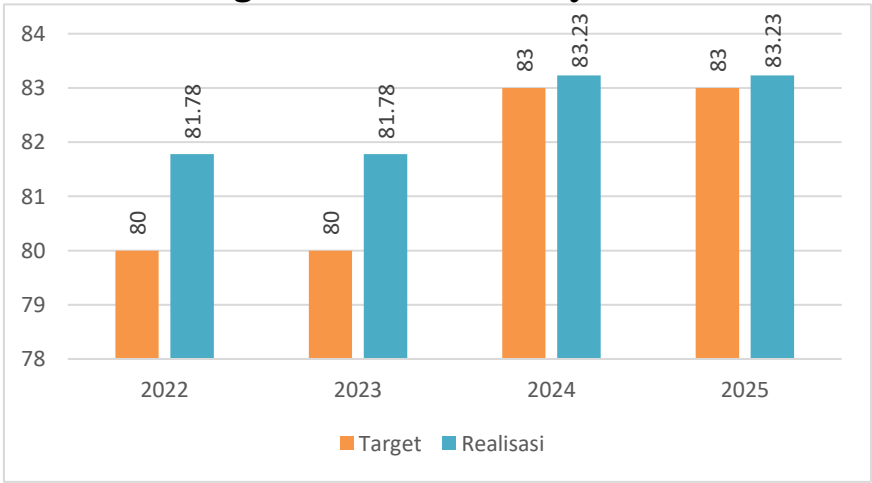


Berdasarkan grafik tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri selama periode 2022 hingga 2025. Secara umum, target partisipasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari 80,26 persen pada tahun 2022 menjadi 84,16 persen pada tahun 2025. Namun demikian, realisasi yang dicapai menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi partisipasi pemuda hanya mencapai 30,11 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 dan 2025 realisasi partisipasi turun menjadi 9,34 persen. Dengan demikian, dapat terlihat adanya kesenjangan yang sangat besar antara target dan realisasi. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan dalam memperoleh data. Faktor pendukung dan penghambat capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendukung :
 - Program pelatihan kewirausahaan dari pemerintah maupun lembaga swasta
- Faktor Penghambat :
 - Pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun masih menempuh pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.
 - Keterbatasan dalam memperoleh data kewirausahaan pemuda
 - Kurangnya motivasi untuk berwirausaha di sebagian pemuda

4) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Gambar 2.5. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan



Berdasarkan grafik perbandingan target dan realisasi tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan maupun organisasi sosial kemasyarakatan selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 dan 2023, target partisipasi ditetapkan sebesar 80 persen, sementara realisasi yang dicapai lebih tinggi, yaitu 81,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda sudah melebihi target yang ditetapkan pada dua tahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024 target meningkat menjadi 83 persen, dan realisasi yang diperoleh juga sedikit lebih tinggi yakni 83,23 persen. Tren yang sama terjadi pada tahun 2025, dengan target sebesar 83 persen dan realisasi tetap konsisten pada 83,23 persen. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan relatif tinggi dan cenderung stabil, bahkan selalu sedikit melampaui target yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Faktor pendukung dan penghambat capaian tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Faktor Pendukung :

- Tingginya minat pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan organisasi
- Kegiatan-kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi kepemudaan yang rutin dilaksanakan

➤ Faktor Penghambat :

- Beberapa kegiatan organisasi cenderung kurang inovatif dan tidak sesuai dengan minat generasi muda dikarenakan keterbatasan anggaran.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari masyarakat umum, organisasi kepemudaan, serta organisasi olahraga. Bagi masyarakat umum, pelayanan yang diberikan berupa pemanfaatan fasilitas olahraga, baik yang bersifat gratis maupun berbayar, sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Pada Bidang Olahraga pelayanan diberikan untuk cabang olahraga, memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas berupa sarana dan peralatan olahraga, meskipun belum seluruh cabang olahraga dapat difasilitasi secara optimal karena keterbatasan sumber daya. Selain itu, Dispora juga menyalurkan bantuan hibah kepada organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, dan NPCI yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga.

Pada bidang kepemudaan, kelompok sasaran pelayanan meliputi pemuda secara individu maupun organisasi kepemudaan. Dispora memberikan fasilitasi dalam bentuk pelayanan pengembangan kapasitas pemuda, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan. Selain itu, Dispora menyalurkan bantuan hibah kepada organisasi kepemudaan seperti Kwartir Cabang Pramuka dan KNPI untuk mendukung program pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan, Dispora memfasilitasi pemberian bantuan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dapat memperluas akses pemuda terhadap pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan Dispora diarahkan untuk memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga secara terpadu melalui dukungan fasilitas,

pembinaan, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepemudaan dan olahraga, Dispora Kota Blitar menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal. Kemitraan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dukungan sumber daya, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan dan olahraga.

1) Mitra Internal

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan dalam proses perencanaan, sinkronisasi program, dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- b) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan dalam pengelolaan dan dukungan anggaran.
- c) Dinas Pendidikan sinergi dalam program pengembangan pemuda, pelajar, serta pembinaan olahraga di sekolah.
- d) Dinas Kesehatan berperan dalam kerja sama dalam layanan kesehatan olahraga, serta penyediaan tenaga medis saat event olahraga.
- e) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Blitar koordinasi dalam pemberian bantuan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.

2) Mitra Eksternal

- a) Organisasi olahraga yaitu KONI, KORMI, NPCI adalah mitra strategis dalam pembinaan atlet, penyelenggaraan event olahraga, dan peningkatan prestasi.
- b) Organisasi kepemudaan yaitu KNPI dan Pramuka (Kwartir Cabang) adalah mitra dalam pembinaan, pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan pemuda.
- c) Perguruan tinggi dan sekolah kerja sama dalam program beasiswa, pengembangan kepemudaan, serta penjangkaran atlet muda.
- d) Klub/komunitas olahraga memberikan dukungan dalam pengembangan cabang olahraga dan partisipasi masyarakat.
- e) Pihak swasta/CSR perusahaan memberikan dukungan pembiayaan, sponsorship, dan penyediaan sarana prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- f) Media massa berperan dalam penyebarluasan informasi kegiatan, publikasi prestasi olahraga, serta promosi program kepemudaan.

Kemitraan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain fasilitasi bantuan hibah, koordinasi lintas perangkat daerah, pendampingan kegiatan, dukungan pembiayaan, penyediaan fasilitas, serta penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga. Dengan dukungan mitra internal maupun eksternal, pelayanan Dispora diharapkan semakin optimal, berdaya guna, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dispora Kota Blitar dapat dikelompokkan ke dalam dua urusan, yaitu urusan kepemudaan, urusan olahraga, urusan kepramukaan. Potensi tersebut antara lain:

- 1) Urusan Kepemudaan
 - a) Persentase jumlah penduduk usia muda yang cukup besar yaitu sebesar 24% dari total jumlah penduduk;
 - b) Berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif di Kota Blitar.
- 2) Urusan Olahraga
 - a) Tersedianya stadion, GOR, dan fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan, event dan pembudayaan olahraga di masyarakat;
 - b) Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, festival olahraga, dan event olahraga;
 - c) Kelompok olahraga yang ada dapat berkembang dan berpeluang mencetak atlet berprestasi.
- 3) Urusan Kepramukaan
 - a) Kegiatan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Potensi-potensi tersebut menjadi modal penting bagi Dispora dalam merumuskan strategi pembangunan kepemudaan dan olahraga, sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat peran pemuda, serta mengoptimalkan prestasi olahraga Kota Blitar.

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Daerah

Berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan, permasalahan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dapat dikelompokkan menjadi dua bidang utama, yaitu bidang kepemudaan dan bidang olahraga.

- 1) Urusan Kepemudaan
 - a) Belum tersedianya data dan kebijakan kepemudaan;
 - b) Masih banyak pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya motivasi;
 - c) Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d) Rendahnya pengetahuan literasi gender pada pemuda;
 - e) Kapasitas organisasi kepemudaan masih kurang dalam manajemen, administrasi, dan akuntabilitas;
 - f) Rendahnya pemuda yang menjadi wirausaha;
 - g) Kirangnya akses dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah;
 - h) Ancaman narkoba, pergaulan bebas, judol dan pengaruh negatif media sosial masih cukup tinggi di kalangan pemuda
- 2) Bidang Olahraga
 - a) Belum tersedianya data dan kebijakan terkait keolahragaan;
 - b) Rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional;
 - c) Sarana dan prasarana olahraga belum sesuai standart;
 - d) Kapasitas organisasi olahraga masih kurang dalam manajemen, administrasi, dan tata kelola keuangan;
 - e) Regenerasi pelatih dan tenaga keolahragaan masih terbatas dan banyak yang belum tersertifikasi;
 - f) Kurangnya scouting dan pemetaan bakat sehingga potensi atlet muda kurang terdeteksi.
- 3) Urusan Kepramukaan
 - a) Rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan kepramukaan secara berkelanjutan;

- b) Masih terdapat kelemahan dalam tata kelola kepramukaan;
- c) Jumlah pembina pramuka yang aktif masih terbatas dan belum semua tersertifikasi;
- d) Dari 10 saka masih ada 8 saka yang terbentuk dan aktif.

Permasalahan Perangkat Daerah tersebut menjadi modal penting bagi Dispora dalam merumuskan strategi pembangunan kepemudaan dan olahraga, sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat peran pemuda, serta mengoptimalkan prestasi olahraga Kota Blitar

2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dalam pembangunan manusia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar perlu memastikan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Blitar 2025–2029.

KLHS Kota Blitar mengidentifikasi berbagai isu strategis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bidang kepemudaan dan olahraga, di antaranya:

- 1) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kualitas pemuda, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Sektor olahraga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, serta daya saing pemuda.
- 2) Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota dengan penyediaan ruang publik dan sarana olahraga yang aman, nyaman, serta inklusif mendukung keterlibatan generasi muda dalam aktivitas positif.
- 3) Minimalisasi degradasi lingkungan melalui pembangunan ramah lingkungan dengan Pembangunan infrastruktur olahraga yang memperhatikan efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan kelestarian lingkungan.

KLHS merumuskan dua skenario utama, yaitu skenario tanpa upaya tambahan (*Business as Usual*/BAU) dan skenario dengan upaya tambahan :

- 1) Skenario BAU
Pencapaian indikator pembangunan cenderung stagnan tanpa adanya inovasi signifikan. Dalam konteks kepemudaan dan olahraga, hal ini berisiko menurunkan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif, memperbesar kesenjangan kualitas SDM, dan membatasi kontribusi olahraga pada pembangunan kesehatan masyarakat.
- 2) Skenario Dengan Upaya Tambahan
Diarahkan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mengambil peran dengan mendorong program inovatif, antara lain pengembangan sport center ramah lingkungan, pembinaan atlet berbasis teknologi, penguatan pendidikan karakter melalui organisasi kepemudaan, serta peningkatan akses olahraga bagi masyarakat difabel.

2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis

Perencanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga tidak lepas dari dinamika global, nasional, dan regional yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Isu lingkungan dinamis ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan, program, dan

kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing.

- Isu Global

Mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, RPJMN 2025–2029, serta isu global pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, beberapa isu global yang relevan bagi sektor kepemudaan dan olahraga adalah:

- Perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan mendorong pembangunan sarana olahraga ramah lingkungan dan penyelenggaraan event olahraga yang berkelanjutan (green sport).
- Bonus demografi dan transformasi SDM menyebabkan peningkatan kualitas generasi muda untuk menghadapi persaingan global.
- Revolusi digital dan disrupsi teknologi mengharuskan pemuda dan insan olahraga menguasai teknologi digital dalam pendidikan, pelatihan, dan manajemen olahraga.
- Globalisasi budaya dan identitas lokal menjadi tanggung jawab pemuda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan identitas daerah di tengah arus globalisasi.
- Kesehatan global pasca pandemi dengan olahraga dan aktivitas kepemudaan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan imunitas, kesehatan mental, dan solidaritas sosial.

- Isu Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 – Lampiran II, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 – Lampiran I dan isu nasional yang berimplikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga meliputi:

- Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kepemudaan.
- Transformasi digital nasional dengan penguatan ekosistem digital untuk mendukung kreativitas, inovasi, serta industri olahraga dan kepemudaan.
- Peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui olahraga sebagai instrumen pembangunan kesehatan preventif dan promotif
- Penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan kebangsaan untuk generasi muda diarahkan untuk menjadi motor persatuan bangsa.
- Pengurangan ketimpangan wilayah dan kelompok masyarakat dengan akses olahraga harus inklusif, termasuk untuk perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal.

- Isu Regional

Mengacu pada RPJMN 2025–2029 (Isu Wilayah Jawa) Perpres Nomor 12 Tahun 2025 – Lampiran IV dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 :

- Urbanisasi dan peningkatan kebutuhan ruang publik sehingga kota-kota di Jawa, termasuk Kota Blitar, memerlukan ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga publik yang layak.
- Ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur yang memerlukan akses sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan perlu merata.
- Kerentanan bencana di Jawa Timur sehingga kegiatan olahraga dan kepemudaan harus berwawasan mitigasi bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.

- Identitas budaya dan sejarah Jawa Timur, sebagai Kota Proklamator, Blitar memiliki peran strategis dalam pembinaan kepemudaan berbasis nilai kebangsaan dan kepahlawanan.
- Peningkatan daya saing ekonomi daerah dan sektor olahraga dapat dikembangkan menjadi sport tourism dan industri kreatif yang mendukung perekonomian lokal.

2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Dispora Tahun 2025–2029, diperlukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis tersebut merupakan hasil dari analisis menyeluruh terhadap potensi daerah, permasalahan pelayanan, serta berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja perangkat daerah.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu:

- 1) Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yang menggambarkan kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 2) Permasalahan pelayanan perangkat daerah, yang mencerminkan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyoroti keterkaitan antara kebijakan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan; dan
- 4) Isu lingkungan dinamis, baik yang berskala global, nasional, maupun regional, yang dapat memengaruhi arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang.

Melalui analisis keempat aspek tersebut, diperoleh gambaran mengenai isu-isu strategis utama yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dalam periode perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, serta program prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Untuk memperjelas proses dan hasil analisis tersebut, berikut disajikan Tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
- Persentase jumlah penduduk usia muda yang cukup besar yaitu sebesar 24% dari total jumlah penduduk - Kegiatan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah	- Belum tersedianya data dan kebijakan kepemudaan - Masih banyak pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya motivasi. - Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Rendahnya pengetahuan literasi gender pada pemuda - Kapasitas organisasi kepemudaan masih kurang dalam manajemen, administrasi, dan akuntabilitas. - Rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan kepramukaan secara berkelanjutan	- Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kualitas pemuda, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Sektor olahraga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, serta daya saing pemuda. - Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota dengan penyediaan ruang publik dan sarana olahraga yang aman, nyaman, serta inklusif mendukung keterlibatan generasi muda dalam aktivitas positif. - Minimalisasi degradasi lingkungan melalui pembangunan ramah lingkungan dengan Pembangunan infrastruktur olahraga yang memperhatikan efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan kelestarian lingkungan.	- Perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan mendorong pembangunan sarana olahraga ramah lingkungan dan penyelenggaraan event olahraga yang berkelanjutan (green sport). - Bonus demografi dan transformasi SDM menyebabkan peningkatan kualitas generasi muda untuk menghadapi persaingan global. - Revolusi digital dan disrupti teknologi mengharuskan pemuda dan insan olahraga menguasai teknologi digital dalam pendidikan, pelatihan, dan manajemen olahraga. - Globalisasi budaya dan identitas lokal menjadi tanggung jawab pemuda	- Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kepemudaan. - Transformasi digital nasional dengan penguatan ekosistem digital untuk mendukung kreativitas, inovasi, serta industri olahraga dan kepemudaan. - Peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui olahraga sebagai instrumen pembangunan kesehatan preventif dan promotif - Penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan kebangsaan untuk generasi muda diarahkan untuk menjadi motor persatuan bangsa. - Pengurangan	- Urbanisasi dan peningkatan kebutuhan ruang publik sehingga kota-kota di Jawa, termasuk Kota Blitar, memerlukan ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga publik yang layak. - Ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur yang memerlukan akses sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan perlu merata. - Kerentanan bencana di Jawa Timur sehingga kegiatan olahraga dan kepemudaan harus	Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan dan kepramukaan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	- Masih terdapat kelemahan dalam tata kelola kepramukaan - Jumlah pembina Pramuka yang aktif masih terbatas dan belum semua tersertifikasi. - Dari 10 saka masih ada 8 saka yang terbentuk dan aktif		dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan identitas daerah di tengah arus globalisasi. - Kesehatan global pasca pandemi dengan olahraga dan aktivitas kepemudaan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan imunitas, kesehatan mental, dan solidaritas sosial.	ketimpangan wilayah dan kelompok masyarakat dengan akses olahraga harus inklusif, termasuk untuk perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal.	berwawasan mitigasi bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. - Identitas budaya dan sejarah Jawa Timur, sebagai Kota Proklamator, Blitar memiliki peran strategis dalam pembinaan kepemudaan berbasis nilai kebangsaan dan kepahlawanan - Peningkatan daya saing ekonomi daerah dan sektor olahraga dapat dikembangkan menjadi sport tourism dan industri kreatif yang mendukung perekonomian lokal.	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif di Kota Blitar - Tersedianya stadion, GOR, dan fasilitas keolahragaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan, event dan pembudayaan olahraga di masyarakat - Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, festival olahraga, dan event olahraga - Kelompok olahraga yang ada dapat berkembang dan berpeluang mencetak atlet berprestasi	- Rendahnya pemuda yang menjadi wirausaha - Kurangnya akses dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah - Ancaman narkoba, pergaulan bebas, judol dan pengaruh negatif media sosial masih cukup tinggi di kalangan pemuda - Belum tersedianya data dan kebijakan terkait keolahragaan - Rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional - Sarana dan prasarana olahraga belum sesuai standar - Kapasitas organisasi olahraga masih kurang dalam manajemen, administrasi, dan tata kelola keuangan. - Regenerasi pelatih dan tenaga keolahragaan masih terbatas dan banyak yang belum tersertifikasi - Kurangnya scouting					Rendahnya kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan kemandirian ekonomi - Rendahnya prestasi olahraga ditingkat regional dan nasional, serta perlunya peningkatan budaya masyarakat dalam berolahraga - Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	dan pemetaan bakat sehingga potensi atlet muda kurang terdeteksi					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perumusan tujuan dan sasaran ini dilakukan melalui proses penerjemahan pohon kinerja perangkat daerah, yang berlandaskan pada:

- 1) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- 2) Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, yang menjadi arah pembangunan daerah secara makro dan menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program strategis.

Tujuan jangka menengah menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan sasaran jangka menengah merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur dari pencapaian tujuan tersebut.

Masing-masing tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran (IKS) sebagai alat ukur capaian kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan ini menjadi dasar bagi penyusunan strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah pada bab-bab berikutnya.

Berikut disajikan Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Sasaran RPJMD: Meningkatkan kualitas generasi muda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain: Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesenjangan Gender	Proses perhitungan IPP beserta formula yang digunakan : - Penentuan bobot masing-masing indikator dan dimensi melalui simulasi <i>equal weight</i> dan <i>non-equal weight</i> (menggunakan pendekatan statistik <i>Principle Component Analysis</i> dan partisipatoris seperti <i>Analytical Hierarchy Process</i>) - Normalisasi Indikator penentuan angka maksimum dan minimum setiap indikator sesuai skala indeks (0-100) Formula Normalisasi: • Indikator bersifat positif $Z_{ij} = 100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij\min}}{X_{ij\max} - X_{ij\min}}$ • Indikator bersifat negatif $Z_{ij} = -100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij\min}}{X_{ij\max} - X_{ij\min}} + 100$ - Agregasi Perhitungan Formulasi yang digunakan pada tingkat domain adalah sebagai berikut: $r_j = \sum_{k=1}^m w_{jk} Z_{ijk}$ Keterangan : r_j = Nilai indeks pada domain ke-j	59.67	Indeks	62.65	65.63	68.61	71.59	74.57	77.55	77.55	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baselin e 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstr a	
						w_{jk} = Bobot pada masing-masing indikator ke- k di domain j Z_{ijk} = Nilai normalisasi indikator ke-k, domain j, wilayah i Kemudian, formulasi yang digunakan pada tingkat indeks adalah sebagai berikut: $IPP_i = \sum_{k=1}^n w_k r_{ik}$ Keterangan IPP_i=Nilai indeks pembangunan pemuda wilayah i w_k = Bobot dari masing-masing domain ke-k r_{ik}= Nilai indeks domain ke-k, wilayah i										
				Indeks Pembanguna n Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran,	Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Untuk menentukan skala tersebut memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum), yang dihasilkan dari formula sebagai berikut: <i>Indeks dimensi</i> $= \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$ Setelah semua indeks dimensi ditemukan, maka proses penghitungandilanjutkan untuk menghasilkan SDI dengan cara	0,32	Indeks s	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,42	IK U

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baselin e 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstr a	
					perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Sebagai sebuah konsep, SDI bukanlah merupakan hal yang baru. Pada tahun 2003-2007, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengimplementasika n SDI yang meliputi empat dimensi dasar, yakni SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran jasmani. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, sejak tahun 2020, SDI dikembangkan menjadi 9 (sembilan) dimensi yang mencakup SDM olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa	menghitung rata-rataindeks gabungan dari setiap dimensi. Dengan demikian, penghitungan SDI dapat diformulasikan sebagai berikut: <i>Indeks SDI</i> $\text{Indeks}(D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9) = \frac{}{9}$ Keterangan: D1= Dimensi SDI pertama, D2= Dimensi SDI kedua, dst 0,800 – 1 = Kategori tinggi 0,500 – 0,799 = Kategori menengah 0,000 – 0,499 = Kategori rendah										
2			Meningkatny a Prestasi Pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda	Banyaknya capaian atau penghargaan yang diraih oleh individu atau kelompok pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda dalam satu tahun	NA	Prestasi	25	27	30	32	34	36	159	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
					(usia satu6–30 tahun) dalam bidang tertentu seperti pendidikan, olahraga, seni, teknologi, kepemimpinan, atau kewirausahaan yang diakui oleh lembaga resmi atau penyelenggara kompetisi, dalam periode waktu dan wilayah tertentu.											
3			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga dalam Kejuaraan Nasional	Jumlah medali atau penghargaan yang diraih oleh atlet atau tim dalam kejuaraan resmi pada tingkat nasional selama periode waktu tertentu (satu tahun).	Jumlah perolehan medali Kejuaraan Nasional dalam satu tahun	2	Medali	NA	2	2	4	4	4	16	
4			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	85.50	Indeks	86,50	87,50	88,50	89,50	90,50	91,50	91,50	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan” serta misi kedua yaitu “Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera”, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga pada periode 2025–2029. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029. Melalui strategi ini, Dispora Kota Blitar berupaya menjawab berbagai isu strategis seperti rendahnya partisipasi dan prestasi pemuda, belum optimalnya kemandirian ekonomi pemuda, serta masih terbatasnya capaian prestasi olahraga dan budaya berolahraga di masyarakat.

Strategi yang dirumuskan diarahkan pada peningkatan daya saing dan partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, dan kepramukaan, disertai penguatan kewirausahaan kreatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia kerja. Di bidang olahraga, strategi difokuskan pada peningkatan prestasi atlet daerah, pengembangan sistem pembinaan yang berjenjang dan berbasis sport science, serta penumbuhan budaya olahraga masyarakat melalui event dan kegiatan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kemudian dijabarkan sebagai operasionalisasi strategi tersebut, mencakup peningkatan kapasitas dan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah, penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan olahraga, pengembangan kewirausahaan dan kreativitas pemuda, serta optimalisasi tata kelola dan pelayanan penunjang perangkat daerah. Dengan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan ini, Dispora Kota Blitar diharapkan mampu membangun ekosistem kepemudaan dan olahraga yang produktif, inklusif, serta berdaya saing menuju Kota Blitar yang sehat dan berprestasi. Teknik merumuskan strategi renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda	- Rendahnya prestasi serta partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan dan kepramukaan - Rendahnya kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan kemandirian ekonomi	- Meningkatkan daya saing, partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kepramukaan - Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif bagi pemuda tanpa diskriminasi
Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Rendahnya prestasi olahraga ditingkat regional dan nasional, serta perlunya peningkatan budaya masyarakat dalam berolahraga	Meningkatkan prestasi olahraga ditingkat regional dan nasional, serta meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Dalam mencapai strategi tersebut, maka dirumuskan penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu penahapan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan fondasi pengembangan kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan kapasitas, karakter, serta wawasan kebangsaan pemuda; pembinaan kelembagaan kepemudaan; dan peningkatan sarana-prasarana olahraga dasar yang berkelanjutan.	Peningkatan kualitas pelayanan dan partisipasi pemuda serta pembinaan olahraga melalui digitalisasi sistem kepemudaan dan keolahragaan, penguatan peran organisasi kepemudaan, dan pembinaan atlet muda potensial berbasis sport science.	Penguatan inovasi, daya saing, dan kolaborasi kepemudaan dan olahraga melalui pengembangan kreativitas, kewirausahaan pemuda, serta peningkatan kompetisi dan event olahraga daerah yang mendukung smart governance.	Pemantapan ekosistem pengembangan kepemudaan dan olahraga yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi prestasi, melalui sinergi antar pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta tenaga keolahragaan.	Akselerasi transformasi tata kelola kepemudaan dan olahraga menuju sistem pembinaan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global, untuk memperkuat kemandirian pemuda dan prestasi olahraga daerah di tingkat nasional

Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan telaah operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD maka dirumuskan arah kebijakan Renstra Dispora sebagai berikut:

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Sub Bidang Kepemudaan: - Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. - Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.	- Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang - Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan - Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif	- Penyediaan data dan kebijakan terkait kepemudaan - Pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi pemuda berprestasi dan kurang mampu. - Peningkatan kompetensi pemuda dalam kewirausahaan, literasi digital, dan keterampilan kerja. - Pengembangan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, kepramukaan dan pemberian penghargaan untuk pemuda yang berprestasi - Peningkatan akses dan keaktifan pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah - Peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya narkoba, radikalisme dan perilaku negatif - Pembinaan dan pendampingan tata kelola organisasi kepemudaan dan kepramukaan agar lebih aktif, inovatif, dan bermanfaat	Dirumuskan dengan mengacu pada NSPK Kepemudaan serta mendukung penguatan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda secara berkelanjutan	
2	- Sub Bidang Olahraga: a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan olahraga masyarakat	- Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan melalui pelatihan, kompetisi, dan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga. - Pengembangan sistem pembinaan olahraga prestasi berbasis sport science untuk meningkatkan kinerja atlet dan pelatih daerah. - Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah secara rutin, profesional, dan berorientasi prestasi. - Optimalisasi pembinaan organisasi keolahragaan dalam tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan dengan sektor swasta. - Pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional sebagai sarana peningkatan kebugaran dan kohesi sosial masyarakat.	Disusun mengacu pada NSPK bidang olahraga dan arah pembangunan SDM unggul melalui kegiatan olahraga yang berdaya saing dan inklusif.
3	- Sub Bidang Kepramukaan a) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.		- Pemberian dukungan pendanaan, fasilitasi, dan pendampingan tata kelola kelembagaan Kwarcab. - Pengembangan program leadership dan penguatan karakter pemuda secara berkelanjutan.	Dirumuskan dengan mengacu pada NSPK Kepramukaan serta mendukung penguatan karakter dan kepemimpinan generasi muda.
			- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Kompilasi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dispora Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi Pemuda	- Meningkatkan daya saing, partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kepramukaan - Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif bagi pemuda tanpa diskriminasi	- Penyediaan data dan kebijakan terkait kepemudaan - Pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi pemuda berprestasi dan kurang mampu. - Peningkatan kompetensi pemuda dalam kewirausahaan, literasi digital, dan keterampilan kerja. - Pengembangan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, kepramukaan dan pemberian penghargaan untuk pemuda yang berprestasi

			- Peningkatan akses dan keaktifan pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah - Peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya narkoba, radikalisme dan perilaku negatif - Pembinaan dan pendampingan tata kelola organisasi kepemudaan dan kepramukaan agar lebih aktif, inovatif, dan bermanfaat - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda secara berkelanjutan
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga ditingkat regional dan nasional, serta meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga	- Penyediaan data dan kebijakan terkait keolahragaan - Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan - Pembinaan atlet dan pelatih secara berjenjang - Penyelenggaraan kompetisi tingkat kota sebagai ajang pencarian bakat - Peningkatan keikutsertaan atlet unggulan dalam kejuaraan provinsi dan nasional - Penyelenggaraan pemusatan latihan daerah (Pelatda) bagi atlet potensial. - Pemberian penghargaan dan apresiasi bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi. - Pembinaan dan pendampingan

			tata kelola organisasi keolahragaan sesuai standar - Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan pemassalan olahraga secara rutin
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mempertegas arah pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dirancanglah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program Kegiatan, dimana setiap Program Kegiatan dijadikan pilar penyangga dalam upaya membangun jalan untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan. Agar proses merumuskan Program Kegiatan dapat dilakukan dengan tepat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar melakukan berbagai upaya dengan melibatkan semua unsur SDM aparatur yang ada untuk melakukan tahap demi tahap proses penyusunan Program Kegiatan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai aspek yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses perumusan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Masing-masing memiliki prioritas yang menjadi kegiatan unggulan, untuk selanjutnya disusun dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggung- jawab dalam memberi nilai manfaat kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2025 – 2029).

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2025--2029 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas

kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas generasi muda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga				• Indeks Pembangunan Pemuda • Indeks Pembangunan Olahraga		
		Meningkatnya Prestasi Pemuda			Jumlah Prestasi Pemuda		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		• Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi sosial kemasyarakatan • Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Meningkatnya kapasitas dan kewirausahaan pemuda	• Jumlah Wirausaha Pemuda • Jumlah Pemuda yang terjamin keberlanjutan pendidikan perguruan tingginya • Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/trainin g dan memperoleh sertifikat	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA							
				kabupaten/kota		Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yg aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi,	Jumlah organisasi kepemudaan yang	Sub Kegiatan Koordinasi,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase pramuka yang aktif	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
				Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				Kepramukaan Tingkat Daerah		dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Prestasi Olahraga			Jumlah Prestasi Olahraga dalam Kejuaraan Nasional		
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase Atlet yang masuk Pelatda Provinsi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana olahraga sesuai standar	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya prestasi pada kejuaraan	Jumlah perolehan medali tingkat kota dan provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				olahraga tingkat kota dan provinsi		Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Meningkatnya partisipasi atlet muda dan peran aktif cabang olahraga prestasi dalam kejuaraan	• Persentase cabang olahraga prestasi yang aktif dalam kejuaraan • Jumlah Atlet Muda	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	
				Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
				Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Sub Kegiatan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang sesuai standar nasional	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Meningkatnya peran aktif cabang olahraga rekreasi dalam kejuaraan	Persentase cabang olahraga rekreasi yang aktif dalam kejuaraan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA							
		Perangkat Daerah					
			Meningkatnya Fasilitas Layanan Kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Meningkatnya persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD	
				Meningaktnya persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya	Jumlah Laporan	Sub Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
					yang Disediakan	Kantor	
				Meningkatnya persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang menjadi anggota aktif dan/atau terlibat dalam kegiatan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, pramuka, organisasi pelajar/mahasiswa , komunitas pemuda) dan organisasi sosial kemasyarakatan (seperti LSM, kelompok keagamaan, komunitas hobi, atau relawan sosial) dalam periode satu tahun terakhir.	Jumlah Pemuda Aktif dalam Organisasi ÷ Total Jumlah Pemuda x 100%	51.56	Perse n (%)	52.19	2.924.858.000	52.81	3.040.000.000	53.41	5.325.000.000	54	4.973.411.542	54.57	4.945.000.000	54.57	21,208,269,542	
	Rasio Wirausaha Pemuda	Perbandingan jumlah pemuda yang menjalankan kegiatan wirausaha secara aktif terhadap total populasi pemuda dalam suatu wilayah atau periode tertentu.	Jumlah Pemuda Wirausaha Aktif ÷ Jumlah Pemuda x 100%	9.34	Perse n (%)	9.74		9.88		10		10.13		10.25		10.25		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kapasitas dan kewirausahaan pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda	Total individu berusia dalam rentang kategori pemuda yang secara aktif menjalankan kegiatan kewirausahaan pada periode dan wilayah tertentu.	Jumlah Wirausaha Pemuda dalam satu tahun	3521	orang	3721	2.731.284.400	3821	3.030.000.000	3921	5.150.000.000	4021	4.963.411.542	4121	4.770.000.000	4121	20.644.695.942	
	Jumlah Pemuda yang terjamin keberlanjutan pendidikan perguruan tingginya	Total individu berusia 16–30 tahun yang sedang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi (Diploma atau Sarjana) dan memperoleh bantuan biaya pendidikan pada perangkat daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga	Jumlah Pemuda yang terjamin keberlanjutan pendidikan perguruan tingginya dalam satu tahun	60	orang	110		120		130		140		150		650		
	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Perbandingan antara jumlah pemuda yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (seperti pelatihan, kursus, atau training) dan berhasil memperoleh sertifikat, terhadap total jumlah	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat ÷ Jumlah Pemuda x 100%	0.25	perse n (%)	0.54		0.58		0.61		0.61		0.61		1.80		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
		pemuda dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).																
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar an Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/ kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Total individu berusia dalam kategori pemuda yang menjalankan usaha dan telah menerima dukungan atau fasilitas dari pemerintah daerah, lembaga, atau organisasi terkait dalam bentuk program pengembangan kewirausahaan.	Jumlah Wirausaha Muda Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dalam satu tahun	50	orang	50	9.997.800	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	250	49.997.800	
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawan an pemuda	Jumlah seluruh kegiatan yang melibatkan pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu.	Jumlah Kegiatan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dalam satu tahun	3	kegia tan	3	131.351.200	3	10.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	50.000.000	15	451.351.200	
Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun di Kota Blitar yang memperoleh akses dan manfaat secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka, melipti kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi dalam satu tahun	200	orang	210	2.579.942.600	220	3.000.000.000	230	4.990.000.000	240	4.803.411.542	250	4.700.000.000	1150	20.073.354.142	
Sub Kegiatan, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah pemuda yang diakui sebagai Pemuda Pelopor di tingkat kota, yang berasal dari seluruh wilayah administratif kota, dan telah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah atau instansi terkait dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pelatihan, bantuan sarana, atau akses jejaring dalam rangka pengembangan potensi dan peran kepeloporan di bidang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, atau teknologi.	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda dalam satu tahun	5	orang	5	9.992.800	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	25	49.992.800	
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata n	Jumlah individu berusia 16–30 tahun yang secara rutin terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat kota dengan status keanggotaan yang jelas dan peran aktif dalam program, kegiatan, atau struktur organisasi.	Jumlah pemuda yg aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam satu tahun	194 34	orang	199 34	193.573.600	204 34	10.000.000	209 34	175.000.000	214 34	10.000.000	219 34	175.000.000	219 34	563.573.600	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										K et		
						2026		2027		2028		2029		2030			Akhir Periode Renstra	
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		TAR GET	PA GU
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang berbasis di tingkat Kota Blitar yang menerima dukungan atau fasilitasi dari Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah pengampu urusan kepemudaan dan olahraga dalam bentuk pembinaan kelembagaan, pelatihan, bantuan sarana/prasarana, pendanaan, atau kemitraan, dalam rangka meningkatkan kapasitas, kinerja, dan keberlanjutan organisasi tersebut.	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota dalam satu tahun	100	orang	100	193.573.600	100	10.000.000	100	175.000.000	100	10.000.000	100	175.000.000	500	563,573,600	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase jumlah individu (terutama dari kalangan anak, remaja, pemuda, dan dewasa) yang aktif mengikuti kegiatan kepramukaan di bawah naungan Gerakan Pramuka, dibandingkan dengan total populasi sasaran dalam suatu wilayah dan periode tertentu.	Jumlah anggota aktif kepramukaan ÷ Jumlah total penduduk sasaran x 100%	0	%	33.9 5	319,997,800	34.4 7	310,000,000	35.7 7	470,000,000	36.4 3	470,000,000	37.2 0	360,000,000	37.2 0	1,929,997,800	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																		
Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase pramuka yang aktif	Persentase Satuan Karya (Saka) Pramuka yang secara aktif mengikuti kegiatan kepramukaan secara rutin dan terdaftar dalam Gerakan Pramuka, dibandingkan dengan total Satuan Karya (Saka) Pramuka yang terdaftar pada periode tertentu.	Jumlah Satuan karya (Saka) yang aktif ÷ Jumlah Satuan Karya (Saka) yang ada x 100%	72.7 3	Perse n (%)	81.8 2	319,997,800	81.8 2	310,000,000	81.8 2	470,000,000	81.8 2	470,000,000	81.8 2	360,000,000	81.8 2	1,929,997,800	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	Total organisasi kepramukaan di tingkat kota yang mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, sebagai hasil dari program pembinaan, pelatihan, fasilitasi, atau dukungan dari instansi pemerintah atau mitra lainnya dalam satu periode.	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	organisasi	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	350.000.000	1	1,750,000,000	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Total sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan di tingkat kota seperti pembina, pelatih, instruktur, atau pengurus yang mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, pendidikan kepramukaan, atau pengembangan kompetensi lainnya dalam satu periode.	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya dalam 1 tahun	50	orang	50	19.997.800	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	250	59.997.800	
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Total unit fasilitas fisik dan perlengkapan pendukung kegiatan kepramukaan di tingkat kota yang dikelola secara aktif oleh organisasi kepramukaan atau pemerintah kota blitar, dan dimanfaatkan secara nyata dalam kegiatan pendidikan kepramukaan, pembinaan karakter, latihan, maupun perkemahan dalam satu periode	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan dalam 1 tahun	Unit	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	2	100.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun											K et	
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET		PA GU
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang masuk Pelatda Provinsi	Atlet yang masuk Pelatda Provinsi adalah atlet Kota Blitar peraih medali emas pada Porprov dan masuk Pelatda Provinsi. Dalam hal pada tahun berkenaan tidak diselenggarakan Pelatda Provinsi maka menggunakan definisi operasional dibagi atlet Kota Blitar peraih medali emas pada Porprov	Jumlah atlet Kota Blitar yang masuk Pelatda Provinsi dibagi Jumlah atlet peraih medali emas pada Porprov dikali 100% Dalam hal pada tahun berkenaan tidak diselenggarakan Pelatda Provinsi maka menggunakan rumus perhitungan dibagi Jumlah atlet Kota Blitar peraih medali emas Porprov dibagi Jumlah atlet peraih medali Porprov dikali 100%	0	Perse n (%)	12.5 0	4.358.727.663	17.5 0	25.530.489.169	25.0 0	4.746.501.355	30.0 0	4.974.000.000	37.5 0	4.770.000.000	24.0 4	44.379,718,187	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga sesuai standar	Persentase dari total sarana olahraga dibawah pengelolaan Perangkat Daerah pengampu urusan kepemudaan dan olahraga yang tersedia di Kota Blitar yang memenuhi standar kelayakan teknis, keamanan, dan fungsi penggunaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang (misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau federasi/organisasi olahraga nasional).	Jumlah sarana olahraga yang sesuai standar ÷ Jumlah total sarana olahraga x 100%	70.00	Perse n (%)	70.00%	406,956,163	80.00%	21,585,489,169	80.00%	519,000,000	80.00%	684,000,000	80.00%	500,000,000	80.00%	23,695,445,332	
Sub Kegiatn Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten /kota yang tersedia	Total unit fasilitas fisik olahraga yang dimiliki, dikelola, atau dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Kota Blitar, baik yang bersifat umum maupun khusus, dalam kondisi layak digunakan, dalam satu tahun	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia dalam satu tahun	10	Unit	10	406,956,163	10	21,585,489,169	10	519,000,000	10	684,000,000	10	500,000,000	10	23,695,445,332	

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																		
Meningkatnya prestasi pada kejuaraan olahraga tingkat kota dan provinsi	Jumlah perolehan medali tingkat kota dan provinsi	Total medali (emas, perak, dan perunggu) yang diraih oleh atlet atau kontingen yang mewakili Kota Blitar dalam ajang kompetisi olahraga resmi di tingkat kota/kabupaten dan provinsi, dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah perolehan medali tingkat kota dan provinsi dalam satu tahun	170	Meda li	180	281.225.100	190	85.000.000	200	280.000.000	210	230.000.000	220	280.000.000	1.00 0	1,156,225,100	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Total penyelenggaraan kegiatan kompetisi olahraga yang mencakup satu atau beberapa cabang olahraga, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Blitar melalui perangkat daerah kepemudaan dan olahraga, organisasi olahraga, atau lembaga resmi lainnya dalam lingkup wilayah Kota Blitar dalam periode satu tahun.	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dalam satu tahun	2	Kejua raan	2	181.245.400	2	60.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	10	781,245,400	
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraa n Kejuaraan tingkat kabupaten/kot a	Total individu atau tim yang secara resmi terdaftar dan berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dalam lingkup wilayah Kota Blitar selama periode satu tahun, baik pada kejuaraan single event maupun multi event.	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota dalam satu tahun	100	Oran g	100	99.979.700	100	25.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	500	374.979.700	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																		
Meningkatnya partisipasi atlet muda dan peran aktif cabang olahraga prestasi dalam kejuaraan	Persentase cabang olahraga prestasi yang aktif dalam kejuaraan	Perbandingan dalam bentuk persentase antara jumlah cabang olahraga prestasi yang secara aktif mengikuti kejuaraan (baik tingkat kab/kota, daerah, dan nasional) dalam suatu periode satu tahun, terhadap total jumlah cabang olahraga prestasi yang ada dan dibina oleh Organisasi Olahraga Prestasi dibawah binaan perangkatat daerah pengampu urusan kepemudaan dan olahraga (KONI)	Jumlah Cabang Olahraga yang Akt if Ikut Kejuaraan ÷ Total Cabang Olahraga Prestasi yang dibina x 100%	73.8 1	Perse n (%)	76.1 5	129.395.600	78.5 7	110.000.000	80.9 5	212.501.355	83.3 3	200.000.000	85.7 1	200.000.000	85.7 1	851.896.955	
	Jumlah Atlet	Total individu yang	Jumlah Atlet Muda dalam satu	0	Oran	10		15		20		25		30		100		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
	Muda	tergolong dalam kelompok usia muda sesuai ketentuan yang berlaku, yang secara aktif terdaftar dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, pelatihan, atau kompetisi olahraga yang diselenggarakan oleh lembaga resmi di tingkat Kota dalam periode satu tahun	tahun		g													
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah																		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Banyaknya atlet yang berasal dari Kota Blitar yang mengikuti proses seleksi resmi oleh lembaga berwenang (seperti KONI, Dispora, atau pengurus cabang olahraga) untuk mewakili daerah pada kegiatan pembinaan, pemusatan latihan, atau kejuaraan olahraga tingkat lebih tinggi (kabupaten/kota, provinsi, nasional) dalam periode satu tahun	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi dalam satu tahun	0	Oran g	50	44.944.000	50	20.000.000	50	45.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	250	169.944.000	

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Total individu atau kelompok yang menerima penghargaan dari pemerintah Kota Blitar sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, atau kontribusi di bidang olahraga dalam satu tahun	Jumlah penerima Penghargaan olahraga dalam satu tahun	100	Oran g	100	14.250.000	100	50.000.000	100	97.501.355	100	100.000.000	100	100.000.000	500	361,751,355	
Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah kegiatan pemusatan latihan atlet yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, yang dalam pelaksanaannya mengintegrasikan pendekatan sport science, seperti pengujian kondisi fisik, psikologi olahraga, gizi olahraga, biomekanika, dan teknologi pendukung pelatihan, dalam satu periode waktu satu tahun	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) dalam satu tahun	2	Pelat da	2	20.201.600	2	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	90,201,600	
Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di Kabuppaten/Kota	Total dokumen resmi yang memuat data dan informasi keolahragaan secara menyeluruh, terstruktur, dan saling terintegrasi yang disusun, dikelola, dan/atau diterbitkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam satu periode, sebagai bagian dari sistem informasi dan perencanaan pengembangan olahraga daerah.	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota dalam satu tahun	0	Doku men	1	50.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	230.000.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun											K et	
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET		PA GU
Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang sesuai standar nasional	Persentase dari jumlah organisasi olahraga yang telah memenuhi kriteria atau standar nasional tertentu (misalnya Standar Nasional Indonesia/SNI, Peraturan Menteri, atau pedoman induk organisasi olahraga nasional) terhadap total organisasi olahraga yang terdata dan dibina oleh Pemerintah Kota Blitar melalui perangkat daerah pengampu urusan kepemudaan dan olahraga pada periode tertentu.	Jumlah Organisasi yang Memenuh i Standar Nasional ÷ Total Organisasi Olahraga yang ada x 100%	100	Perse n (%)	100	3.340.000.000	100	3.650.000.000	100	3.525.000.000	100	3.650.000.000	100	3.590.000.000	100	17,755,000,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait																		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/Ko ta	Total dokumen resmi yang menjadi bukti pelaksanaan atau hasil dari kegiatan peningkatan kerja sama antara organisasi keolahragaan di tingkat kota dengan organisasi olahraga, yang disusun dan diadministrasikan dalam satu periode.	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dalam satu tahun	3	Doku men	3	3.340.000.000	3	3.650.000.000	3	3.525.000.000	3	3.650.000.000	3	3.590.000.000	15	17,755,000,000	

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																		
Meningkatnya peran aktif cabang olahraga rekreasi dalam kejuaraan	Persentase cabang olahraga rekreasi yang aktif dalam kejuaraan	Persentase cabang olahraga rekreasi yang secara aktif berpartisipasi dalam kejuaraan atau festival olahraga rekreasi dalam periode tertentu terhadap total cabang olahraga rekreasi yang dibina oleh Pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu urusan kepemudaan dan olahraga (KORMI)	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi yang Aktif Ikut Kejuaraan ÷ Total cabang olahraga rekreasi yang dibina x 100%	0	Perse n (%)	28.5 7	201.150.800	35.7 1	100.000.000	42.8 6	210.000.000	50.0 0	210.000.000	57.1 4	200.000.000	57.1 4	921,150,800	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Total dokumen laporan resmi yang disusun sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkumpulan olahraga rekreasi di tingkat kota, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi, kualitas kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, dalam satu periode.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dalam satu tahun	3	lapor an	3	201.150.800	3	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	901.150.800	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Perbandingan jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang dilaksanakan sesuai standa dengan jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang tersedia lalu dikalikan 100%	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar ketentuan yang berlaku ÷ jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada x 100 %	100	Perse n (%)	100	5.100.879.432	100	4.857.897.100	100	5.301.230.068	100	5.264.908.905	100	5.143.506.214	100	25,668,421,719	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ÷ Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun x 100%	100	Perse n (%)	100 %	12.112.600	100 %	7.000.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	100 %	52,112,600	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	2	Doku men	2	1.578.900	3	1.500.000	2	1.500.000	3	1.500.000	2	1.500.000	12	7.578.900	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semest eran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	20	Lapor an	20	3.000.000	20	1.500.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	100	13,500,000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sktoral Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	Data	1	1.525.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.525.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	Berit a Acara	1	3.000.000	2	1.000.000	1	2.500.000	2	2.500.000	1	2.500.000	7	11.500.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	13	Doku men	13	2.021.500	13	1.000.000	13	2.000.000	13	2.000.000	13	2.000.000	65	9,012,500	
Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Harmonisasi Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	1	Berit a Acara	1	996.200	2	1.000.000	1	1.000.000	2	1.000.000	1	1.000.000	7	4.996.200	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Meningkatnya persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ÷ Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	100	Perse n (%)	100	2.568.085.332	100	2.574.897.100	100	2.616.730.068	100	2.579.408.905	100	2.657.484.859	100	12.996.606.264	
Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	234	Oran g/ bulan	234	2.567.089.132	234	2.573.897.100	234	2.615.730.068	234	2.578.408.905	234	2.656.484.859	1.170	12,991,610,064	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	12	Lapor an	12	996.200	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60	4,996,200	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningaktnya persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi Barang Milik Daerah perangkat daerah sesuai standar adalah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah administrasi BMD perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ÷ Jumlah administrasi BMD perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	100	Perse n (%)	100 %	2.012.500	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	10,012,500	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD memuat laporan RKBMD dan PRKBMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	2	Lapor an	2	2.012.500	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	10	10,012,500	
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
Meningkatnya persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah memuat Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi pendapatan daerah yang terlayani sesuai standar ÷ jumlah jenis administrasi pendapatan daerah yang harus dilayani x 100%	100	Perse n (%)	100 %	2.012.500	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	10,012,500	
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah memuat Laporan Fungsional Pendapatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun berjalan	12	Doku men	12	2.012.500	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10,012,500	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian yang memuat Laporan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ÷ jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	100	Perse n(%)	100 %	62.700.300	100 %	30.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	272.700.300	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	Paket	1	10.250.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	45.250.000	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan adalah ASN (PNS,P3K, dan Tenaga Administrasi Umum Kantor) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun berjalan	60	Oran g	60	52.450.300	60	25.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	300	227.450.300	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ÷ Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan x 100%	100	Perse n(%)	100 %	284.754.000	100 %	181.000.000	100 %	285.500.000	100 %	285.500.000	100 %	285.500.000	100 %	1,322,254,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Paket	1	5.001.000	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	22,501,000	

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	paket	1	29,001,200	1	14,000,000	1	29,000,000	1	29,000,000	1	29,000,000	5	130,001,200	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	1	paket	1	49,994,100	1	25,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	224,994,100	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	8	paket	8	49,998,800	8	25,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	40	224,988,800	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersedianya Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	1	Paket	1	25.000.100	1	10.000.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	5	111.500.100	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang- undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan pada tahun berjalan	12	Doku men	12	2.754.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	14.254.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	12	Lapor an	12	119.999.200	12	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	60	579.999.200	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	4	Doku men	4	2.019,400	4	1.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	20	9,019,400	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi Laporan Pelaksanaan SPBE Dispora	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada tahun berjalan	1	Doku men	1	996,200	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	4,996,200	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ÷ Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100%	100	Perse n(%)	100 %	1.779.000	100 %	1.000.000	100 %	34.000.000	100 %	35.000.000	100 %	2.000.000	100 %	73,779,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel																		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Unit	0	0	0	0	1	32.000.000	1	33.000.000	0	0	2	65,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	3	Unit	3	1.779.000	3	1.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	15	8.779.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Meningkatnya persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ÷ Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan x 100%	100	Perse n(%)	100 %	2.007.405.900	100 %	1.950.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	1.963.521.355	100 %	9.920.927,255	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	Lapor an	36	20.000.900	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	180	1.000.000.900	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	60	Lapor an	60	1.807.405.000	60	1.750.000.000	60	1.800.000.000	60	1.800.000.000	60	1.763.521.355	300	8.920.926.355	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Meningkatnya persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ÷ jumlah jenis BMD yang harus dipelihara x 100%	100	Perse n(%)	100 %	160.017.300	100 %	110.000.000	100 %	290.000.000	100 %	290.000.000	100 %	160.000.000	100 %	1,010,017,300	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	1	Unit	1	50.003.800	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250,003,800	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	10	Unit	10	80.009.600	10	50.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	50	370.009.600	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel																		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah Mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	Unit	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	2	100.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	46	Unitt	46	30.003.900	46	10.000.000	46	30.000.000	46	30.000.000	46	30.000.000	230	130.003.900	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset Tak Berwujud yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Aset Tak Berwujud yang dipelihara pada tahun berjalan	0	Unit	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	2	60.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

Bidang Urusan/Program /Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /Output	Indikator Outcome /Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 202 4	Satua n	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhab ilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	0	Unit	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	2	100.000.000	

Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	Pembangunan Fasilitas Olahraga (Sirkuit Sentul)	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya standart sarana dan prasarana olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya ketersediaan jumlah sarana dan prasarana olahraga	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi. Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus memiliki kaitan yang erat dengan Indikator Kinerja Pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD. Indikator tersebut harus mampu menterjemahkan esensi dari Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan adanya keterkaitan antara Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dengan Indikator Kinerja Kota Blitar dalam RPJMD, maka dapat dipastikan bahwa Outcome dan Impact dari program kegiatan yang disusun akan mampu mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Misi Kedua : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Keren, Sehat dan Berdaya Saing
- Tujuan Ketiga : Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM
- Sasaran Ketiga : Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA yang akhirnya menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan sasaran atau kegiatan.

Sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Blitar, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan Pembinaan Kepemudaan dan Pengembangan Keolahragaan. Untuk dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dibutuhkan Indikator Kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah merumuskan Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan tupoksi dan Indikator Kinerja Pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar. Indikator Kinerja yang disusun merupakan Indikator Capaian Sasaran Program Kegiatan yang akan menjadi variabel ukuran Kinerja Instansi Pemerintah dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan target yang dirumuskan didalam Rencana Kerja (RENJA). Sebagai gambaran dari optimalisasi pelaksanaan program kegiatan adalah dengan mengukur akuntabilitas kinerja dengan melibatkan angka-angka capaian yang

termaklup dalam Indikator Kinerja Sasaran. Untuk mewujudkan tingginya nilai akuntabilitas kinerja, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Sasaran dalam Renstra, yang disusun berdasarkan pada kontribusi usulan Program Kegiatan yang direncanakan oleh Bidang dalam Instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Perumusan Indikator Kinerja yang benar akan memberikan dampak pada kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, Angka dalam bentuk kuantitas atau jumlah dan kualitas atau prosentase yang dihasilkan akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Angka yang mampu diukur dalam Indikator Kinerja belum dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu program kegiatan. Keberhasilan kinerja juga ditentukan oleh output, outcome, benefit dan impact dari pelaksanaan pembangunan tersebut kepada sasaran pembangunan, yaitu masyarakat luas, khususnya rakyat kecil.

Dalam Renstra ini telah dirumuskan Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar beserta target capaiannya yang diperoleh dari data input setiap kegiatan yang diprogramkan. Untuk dapat membaca tingkat keberhasilan kinerja perlu data Indikator Kinerja dari tahun awal hingga akhir perencanaan pembanguana jangka menengah atau RPJMD. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun RPJMD akan terlihat pergerakan data pada Indikator tersebut, dimana fluktuasi data itu merupakan gambaran capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan. Capaian itu dikatakan baik atau berhasil bila realisasi yang dicapai mampu mendekati atau sama dengan nilai target yang telah ditetapkan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh program kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Pada Bidang Kepemudaan merumuskan Indikator Kinerja Sasaran yang dapat memberikan data capaian kinerja pembangunan yaitu Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang mengarah pada kegiatan yang mengakomodasi para pemuda untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembekalan wawasan, baik wawasan yang berkaitan dengan Kepemimpinan, Kepeloporan maupun kewirausahaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Indikator Kinerja ini akan memberikan gambaran capaian kinerja Bidang Kepemudaan untuk setiap tahun dalam jangka waktu pembangunan menengah selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan pada Bidang Olahraga merumuskan Indikator Kinerja Sasaran yang dapat memberikan Data Capaian Kinerja Pembangunan Keolahragaan. Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Olahraga di Kota Blitar dapat dilihat dari seberapa optimal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam menjalankan Program Kegiatannya. Sebagai Dinas yang memiliki tupoksi untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi atlet dan penyandang disabilitas di Kota Blitar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran yang dapat memberikan gambaran mengenai pengembangan olahraga, baik dibidang Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, maupun Olahraga Rekreasi termasuk Olahraga Disabilitas.

Dalam setiap perencanaan selalu dilengkapi dengan target - target yang harus dicapai. Target tersebut ditetapkan berdasarkan angka capaian yang realistis berdasarkan data capaian ditahun sebelumnya. Penetapan target juga didasarkan pada ketersediaan anggaran yang sudah diatur berdasarkan Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan. Angka- angka target yang realistis ini menjadi fokus dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa terlepas dari target yang telah ditetapkan. Angka target yang realistis ini menggambarkan adanya kesesuaian antara cakupan sasaran yang dapat diakomodir dengan anggaran yang dikeluarkan.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain: Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesenjangan Gender	Proses perhitungan IPP beserta formula yang digunakan : - Penentuan bobot masing-masing indikator dan dimensi melalui simulasi <i>equal weight</i> dan <i>non-equal weight</i> (menggunakan pendekatan statistik <i>Principle Component Analysis</i> dan partisipatoris seperti <i>Analytical Hierarchy Process</i>) - Normalisasi Indikator penentuan angka maksimum dan minimum setiap indikator sesuai skala indeks (0-100) Formula Normalisasi: • Indikator bersifat positif$Z_{ij} = 100x \frac{X_{ijk} - X_{ij \min}}{X_{ij \max} - X_{ij \min}}$ • Indikator bersifat negatif$Z_{ij} = -100x \frac{X_{ijk} - X_{ij \min}}{X_{ij \max} - X_{ij \min}} + 100$ - Agregasi Perhitungan Formulasi yang digunakan pada tingkat domain adalah sebagai berikut:$r_j = \sum_{k=1}^m w_{jk} Z_{ijk}$ Keterangan : r_j = Nilai indeks pada domain ke-j	Nilai	59.67	62.65	65.63	68.61	71.59	74.57	77.55	77.55	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			w_{jk} = Bobot pada masing-masing indikator ke- k di domain j Z_{ijk} = Nilai normalisasi indikator ke-k, domain j, wilayah i Kemudian, formulasi yang digunakan pada tingkat indeks adalah sebagai berikut: $IPP_i = \sum_{k=1}^n w_k r_{ik}$ Keterangan IPP_i = Nilai indeks pembangunan pemuda wilayah i w_k = Bobot dari masing-masing domain ke-k r_{ik} = Nilai indeks domain ke-k, wilayah i										
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Sebagai	Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Untuk menentukan skala tersebut memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum), yang dihasilkan dari formula sebagai berikut: <i>Indeks dimensi</i> $= \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$ Setelah semua indeks dimensi ditemukan, maka proses	Indeks	0,32	0.32	0.34	0.36	0.38	0.4	0.42	0.42	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		sebuah konsep, SDI bukanlah merupakan hal yang baru. Pada tahun 2003-2007, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengimplementasikan SDI yang meliputi empat dimensi dasar, yakni SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran jasmani. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, sejak tahun 2020, SDI dikembangkan menjadi 9 (sembilan) dimensi yang mencakup SDM olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.	penghitungandilanjutkan untuk menghasilkan SDI dengan cara menghitung rata-rataindeks gabungan dari setiap dimensi. Dengan demikian, penghitungan SDI dapat diformulasikan sebagai berikut: <i>Indeks SDI</i> $Indeks(D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9) = \frac{}{9}$ Keterangan: D1= Dimensi SDI pertama, D2= Dimensi SDI kedua, dst 0,800 – 1 = Kategori tinggi 0,500 – 0,799 = Kategori menengah 0,000 – 0,499 = Kategori rendah										

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan /kursus /training dan memperoleh sertifikat	Perbandingan antara jumlah pemuda yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (seperti pelatihan, kursus, atau training) dan berhasil memperoleh sertifikat, terhadap total jumlah pemuda dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan dan memperoleh Sertifikat ÷ Jumlah Pemuda x 100%	%	0,25	0,54	0.54	0.58	0.61	0.61	0.61	1.80	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Atlet yang masuk Pelatda Provinsi adalah atlet Kota Blitar peraih medali emas pada Porprov dan masuk Pelatda Provinsi	Jumlah atlet daerah kab/kota yang masuk pelatda provinsi dibagi Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)	%	0	0	0.09	0.09	0.18	0.18	0.27	0.27	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dispora Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi Dispora dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Renstra Dispora Kota Blitar menjabarkan perencanaan strategis dan hal-hal yang hendak dicapai dalam periode tersebut, dan langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran hingga program dapat tercapai serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Dispora Kota Blitar Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dispora Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispora Kota Blitar dalam kurun waktu masa perencanaan tahun 2025 – 2029, dengan mempertimbangkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renstra Dispora Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 terdapat beberapa substansi dan kaidah yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Renstra Dispora Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2025 – 2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien
2. Renstra Dispora Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun memperhatikan perkembangan isu global, nasional, regional dan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Kota Blitar tahun 2025 – 2029
3. Renstra Dispora Kota Blitar sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan
4. Penyusunan program dan kegiatan harus mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan telah diselaraskan dengan kinerja yang diharapkan di tingkat pusat dan provinsi
6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan yang melibatkan seluruh bidang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renstra Dispora Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dispora Kota Blitar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dispora Kota Blitar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dispora Kota Blitar.

Blitar, 25 September 2025
Kepala Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga Kota Blitar



Moh. Aminuracholis, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006